

Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia

Hubertus Herianto¹, Robertus Wijanarko²
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
Email: heriantohubertus@gmail.com¹, yrnang@yahoo.com²



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Diterima: 22-09-2021

Direview: 22-11-2021

Publikasi: 30-4-2022

Abstrak

Populisme merupakan wajana dan cara berpolitik yang tengah menggeliat saat ini. Di Indonesia populisme telah menjelma menjadi politik identitas keagamaan. Fenomena inilah yang diuraikan dalam tulisan ini. Metode yang digunakan ialah pembacaan kritis atas fenomena politik identitas keagamaan di Indonesia dalam kaca mata populisme. Pendekatan yang menyerupai studi komparasi ini berguna untuk melihat indikasi adanya populisme dan benih-benihnya dalam politik identitas keagamaan yang kerap terjadi di Indonesia. Berdasarkan studi dan analisis yang dilakukan, populisme memiliki kesamaan dengan politik identitas berwajah agama di Indonesia. Kesamaan ini dari sendirinya membuat politik identitas keagamaan lolos kategori populisme. Politik identitas keagamaan menjadi salah satu wajah populisme atau populisme mewujud dalam politik identitas keagamaan. Kemunculan populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia terjadi karena tingginya angka korupsi, mengakarnya keinginan untuk membentuk negara berasas agama, dan menguatnya peran agama dalam penyelenggaraan negara. Fenomena kelahiran populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia dapat diatasi dengan cara menerapkan suatu sistem penyelenggaraan negara yang transparan dan responsif kepada masyarakat, memaksimalkan pendidikan kewarganegaraan, dan mengoptimalkan peran media massa.

Kata Kunci: agama; rakyat; populisme; politik identitas

Abstract

Populism is a style and way of politics that is currently being stretched. In Indonesia, populism has transformed into religious identity politics, and this phenomenon is described in this paper. The method used is a critical reading of the phenomenon of religious identity politics in Indonesia from a populist perspective. This approach, which resembles a comparative study, is helpful to see indications of populism and its seeds in the politics of religious identity that often occurs in Indonesia. Based on the studies and analysis conducted, populism has similarities with identity politics with a religious face in Indonesia. This similarity naturally makes religious identity politics escape the category of populism. Religious identity politics is one of the faces of populism, or populism manifests itself in religious identity politics. The emergence of populism in the face of religious identity politics in Indonesia occurs because of the high rate of corruption, the rooted desire to form a state based on religion, and the strengthening role of religion in the administration of the state. The phenomenon of the birth of populism in the face of religious identity politics in Indonesia can be overcome by implementing a state administration system that is transparent and responsive to the public, maximizes civic education, and optimizes the role of the mass media.

Keywords: religion; people; populism; identity politics

1. Pendahuluan

Populisme bukanlah suatu ideologi yang mantap dan matang. Cas Mudde (2017) melihat populisme sebagai suatu ideologi tipis yang membelah masyarakat menjadi dua kubu, yakni 'rakyat yang murni' dan 'para elit yang korup'; serta sesuatu yang berisikan tuntutan agar politik menjadi perwujudan dari *volonté générale* (kepentingan umum). Dalam populisme, para penguasa atau elit pemerintah dipandang sebagai kelompok yang berlawanan dengan rakyat, sebagai musuh rakyat. Mereka dituduh sebagai pihak yang koruptif, penindas rakyat, dan sekelompok orang yang mengutamakan kepentingan diri sekaligus mengabaikan rakyat akar rumput. Keberadaan populisme sebagai yang non-ideologis memperjelas pandangan umum bahwa populisme hanyalah metode berpolitik yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang bertentangan dengan penguasa. Suatu cara berpolitik yang menghadap-hadapkan rakyat dengan penguasa. Gaya berpolitik ini biasanya dilakukan oleh tokoh yang memiliki misi politis tersendiri. Salah satunya ialah untuk mendapatkan dukungan dari massa atau rakyat. Tokoh-tokoh yang terarah pada tujuan yang demikian akan mendeklarasikan diri sebagai 'sosok adil' yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dewasa ini populisme kembali mendapat panggung dalam perpolitikan internasional. Kendati hanya 'menginang' pada ideologi-ideologi besar seperti sosialisme, liberalisme, komunisme, dan lainnya, populisme nyatanya bertumbuh subur dan bahkan menjangkau negara berdemokrasi matang seperti Amerika Serikat (Wisnu, 2019). Hal yang sama juga dapat disimak dalam dinamika perpolitikan Indonesia beberapa tahun terakhir. Meski memiliki kemiripan dengan gerakan populis di negara lain, populisme di Indonesia cukup berbeda. Halnya tampak dalam kecenderungan untuk menjadikan agama, khususnya Islam yang adalah mayoritas, sebagai basis pergerakannya. Dengan kata lain, populisme di Indonesia tampil dalam wajah politik identitas. Identitas yang 'dimainkan' adalah agama, khususnya Islam. Fenomena yang sama sebenarnya juga terjadi di negara-negara mayoritas Islam di dunia (Hilmy, 2020). Halnya menjadi marak karena gerakan politik berbasis agama mengandung kemudahan untuk memobilisasi suara mayoritas guna memenangkan partai atau aktor populis dalam kontestasi politik (Hilmy, 2020). Contoh populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia dapat disimak dalam pemilihan umum pada tahun 2017. Saat itu, isu penistaan agama oleh Basuki T. Purnama atau Ahok digiring sedemikian rupa sehingga melahirkan aneka aksi dan narasi pembelaan agama yang melahirkan gerakan besar dari kelompok 212 (Hilmy, 2020). Ahok yang beragama non-mayoritas pada gilirannya disingkirkan dari arena perpolitikan masa itu.

Keterkaitan populisme dan politik identitas keagamaan di Indonesia menarik untuk ditelaah lebih jauh. Hal inilah yang akan diuraikan dalam tulisan ini. Uraian penulis hanya berfokus pada beberapa hal pokok berikut. *Pertama*, menjelaskan populisme secara singkat dan sejauh perlu. *Kedua*, menguraikan keterkaitan politik identitas keagamaan di Indonesia dengan populisme. *Ketiga*, menyajikan solusi-solusi yang dapat ditempuh guna menahan laju perkembangan populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah pembacaan kritis atas fenomena politik identitas keagamaan di Indonesia dalam kaca mata populisme. Dalam metode ini penulis mendalami dan menganalisis permasalahan politik identitas keagamaan di Indonesia demi melihat keterhubungannya dengan populisme. Penggunaan metode ini ditopang oleh telaah penulis atas beberapa literatur yang berbicara mengenai populisme, baik berupa buku, jurnal, maupun artikel. Sumber utama yang digunakan penulis ialah tulisan Cas Mudde dalam *A Very Short Introduction*. Berdasarkan pendekatan tersebut ada dua langkah yang dilakukan penulis dalam uraian ini (Ilaa, 2021). *Pertama*, deskripsi. Pada poin ini penulis menjelaskan populisme secara umum, terutama yang disajikan Mudde. Selanjutnya penulis melakukan langkah kedua yang disebut analisis-interpretatif. Di sini penulis menganalisis dan menginterpretasi politik identitas keagamaan di Indonesia guna melihat keterhubungannya dengan populisme.

3. Pembahasan

a. Sekilas Tentang Populisme

1) Pengertian Dan Cara Kerja Populisme

Menurut Mudde (2017), populisme adalah suatu ideologi tipis yang membelah masyarakat menjadi dua bagian, yakni rakyat dan elit penguasa, dan yang berisikan wacana

bahwa aktivitas politik mesti mewujudkan kepentingan bersama masyarakat (*populism is a thincentered ideology that considers society to be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic camps, "the pure people" versus "the corrupt elite," and which argues that politics should be an expression of the volonté générale or general will of the people*). Pendapat ini mencakup dua hal penting mengenai makna dan hakikat populisme. *Pertama*, populisme tidak merupakan suatu ideologi. Hal ini sangat mungkin, sebab ideologi merupakan kumpulan ide normatif tentang sifat manusia dan masyarakat serta mencakup organisasi dan tujuan masyarakat (Mudde, 2017). Sedangkan populisme hanya memiliki ruang lingkup sangat terbatas dan lebih merupakan suatu konsep yang mengalami "*Cinderella Complex*" atau konsep yang ambigu, elusif, dan tumpang tindih secara teoritis (Margiansyah, 2019). Lebih dari itu, *de facto* populisme hampir selalu terikat dengan elemen ideologis lainnya dan 'mengingat' pada ideologi-ideologi matang. Di sini menjadi jelas bahwa peranan asli populisme hanyalah sebagai metode berpolitik yang digunakan oleh siapapun dan dalam ideologi manapun guna mendapatkan dukungan dari rakyat yang merasa diabaikan oleh elit penguasa. *Kedua*, argumentasi utama populisme adalah memperjuangkan kepentingan rakyat demi mewujudkan *bonum commune*. Di suatu sisi hal ini sangat penting dan merupakan koreksi atas sikap penguasa yang kadangkala mengabaikan kepentingan rakyat. Kenyataan ini dapat disimak dalam menjamurnya kasus korupsi di negara tertentu, semisal di Indonesia. Di lain sisi, kepentingan umum dalam gerakan populisme hanyalah instrumen politis yang sengaja didengungkan untuk mendapat simpati rakyat. Dengan kata lain, *concern* utama populisme bukanlah kepentingan dan suara rakyat, melainkan peluang bagi mereka untuk mendapatkan kekuasaan karena didukung oleh rakyat. Inilah mengapa Mudde menyebut populisme sebagai ancaman sekaligus koreksi atas sikap penguasa yang menjauhkan diri dari rakyat (*populism is seen as a threat but also as a potential corrective for a politics that has somehow become too distant from "the people"*) (Müller, 2016).

Pandangan Mudde ini *analog* dengan pendapat Laclau dalam *On Populist Reason*. Laclau mendefinisikan populisme sebagai strategi *diskursif* untuk mengonstruksi batas politik yang membagi masyarakat ke dalam dua kubu, dan menyerukan untuk memobilisasi rakyat ("*underdog*") melawan penguasa ("*those in power*") (Mouffe, 2020). Tidak berbeda dengan Mudde, Laclau menempatkan populisme hanya sebagai salah satu strategi berpolitik. Halnya memperjelas posisi populisme sebagai salah satu dari sekian banyak cara berpolitik dan bukan ideologi. Populisme hanyalah 'benalu' yang menempel pada suatu ideologi dengan tetap mempertimbangkan situasi negara di mana ia diberlakukan. Patut ditambahkan bahwa populisme lebih sering berkembang di negara-negara yang menganut sistem demokrasi liberal. Paham liberal dalam demokrasi ini dimanfaatkan para populis untuk mendukung gerakannya. Salah satu buktinya terletak pada dalil bahwa tindakan mereka merupakan perwujudan dari kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ranah politik.

Kedua pendapat di atas juga menyinggung cara kerja populisme dalam memobilisasi dukungan masyarakat. Pertama-tama kaum populis membagi masyarakat menjadi dua, yaitu rakyat biasa dengan para elit pemerintah. Selanjutnya, rakyat ditempatkan sebagai pihak yang diabaikan, sementara penguasa dilabeli sebagai kelompok penindas, cenderung korup, dan hanya mendahulukan kepentingan diri. Pelabelan negatif atas penguasa inilah yang mendatangkan keuntungan bagi kaum populis. Ketika pemerintah dipandang sebagai tokoh yang mengabaikan kehendak rakyat, kaum populis lalu menawarkan diri sebagai pembawa perubahan. Mereka mendeklarasikan diri sebagai pribadi-pribadi yang, bila diberi kesempatan untuk berkuasa, akan mengedepankan kehendak rakyat akar rumput. Narasi-narasi diri ini diperkuat pula dengan ciri-ciri para aktor populis yang biasanya berkharisma sehingga mampu menarik perhatian masyarakat. Kendati narasi ini bersifat kedok semata, dalam artian digemakan hanya untuk mendatangkan dukungan dan simpati rakyat, kerap terjadi bahwa rakyat akan memihak mereka dan tak jarang mendukung mereka untuk melengserkan pemerintah. Fenomena ini dapat disimak dalam kemenangan Hugo Chavez dalam perpolitikan Venezuela (Mudde, 2017).

2) Pendekatan-Pendekatan dalam Populisme

Ada aneka macam pendekatan yang digunakan dalam populisme. Dua diantaranya ialah pendekatan *diskursif* Laclau dan pendekatan *ideasional* Mudde. *Pertama*, pendekatan Laclau. Pendekatan *diskursif* Laclau lebih menekankan pada konstruksi politik akan penyatuan "tuntutan/aspirasi" yang homogen dari masyarakat yang heterogen dalam dikotomi antara tuntutan "rakyat" yang tidak terpenuhi dan kekuasaan yang tidak responsif (Margiansyah, 2019).

Dalam pendekatan ini kaum populis berusaha mencari satu aspirasi yang mewakili kepentingan seluruh rakyat yang berbeda. Artinya kaum populis, dengan mengatasmakan kepentingan rakyat, membentuk suatu agenda politik yang memuat aspirasi bersama dari keseluruhan masyarakat yang berbeda. Hemat penulis, hal inilah yang membuat gerakan populisme di Amerika Latin berhasil dan bertumbuh subur. Salah satu aspirasi masyarakat yang dijadikan sebagai agenda politik kaum populis Amerika Latin ialah mengusahakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Halnya sejalan dengan situasi masyarakat yang berada dalam situasi kemiskinan dan penderitaan serta kenyataan bahwa penguasa hidup dalam keadaan serba berkecukupan. Kaum populis Amerika Latin mendapat tempat di hati rakyat karena mereka memberikan janji akan menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat ketika berkuasa. Mereka mengambil sikap yang berlawanan dengan pemerintah yang sedang berkuasa dan melabeli mereka sebagai pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab atas kebijakan perekonomian, sehingga masyarakat diterlantarkan secara ekonomi. Kaum populis Amerika Latin yang berhasil dengan menerapkan pendekatan *diskursif* ini ialah Carlos Menem (Argentina), Fernando Collor de Mello (Brasil), Alberto Fujimori (Peru), dan Hugo Chavez (Venezuela) (Mudde, 2017).

Kedua, pendekatan *ideasional* Mudde. Fokus pendekatan ini ialah retorika dalam upaya memobilisasi massa dengan melibatkan tiga konsep inti populisme, yakni 'rakyat' (*the people*), "elit" (*the elite*), "kehendak umum rakyat" (*the general will atau the volonté générale*) (Mudde, 2017). Praksis pendekatan ini mewujudkan dalam upaya pemisahan yang jelas antara rakyat dengan pemerintah. Rakyat dalam artian ini mengacu pada rakyat sebagai yang berdaulat, rakyat biasa dan suatu bangsa secara keseluruhan (*the people as sovereign, as the common people, and as the nation*) (Mudde, 2017). Sedangkan '*the elite*' adalah mereka yang menempati jabatan tertentu dalam suatu negara atau ringkasnya para penguasa. Antara rakyat dengan kaum elit ada benturan yang tidak terhindarkan, terutama akibat kehadiran kaum populis yang menuduh penguasa melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Pertentangan antarkeduanya semakin tak terhindarkan karena beberapa perbedaan dalam bidang-bidang sekunder seperti kekuatan politik, status sosio-ekonomi dan kebangsaan (Mudde, 2017).

Perbedaan yang ada menempatkan rakyat sebagai yang lebih 'rendah' dibandingkan dengan penguasa. Halnya sangat *problematis* sebab berlawanan dengan konsep demokrasi yang memosisikan rakyat sebagai sumber kekuasaan sekaligus sasaran aktivitas berpolitik (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Fenomena-fenomena ini kemudian melahirkan suatu kesimpulan bahwasanya para penguasa sebenarnya tidak mendahulukan hal-hal yang berguna untuk mewujudkan *bonum commune*. Persis cela inilah yang digunakan kaum populis dalam memobilisasi rakyat. Boleh dikatakan bahwa dalil yang digunakan kaum populis dalam memperkeruh hubungan rakyat adalah ketidakperhatian penguasa pada aspirasi dan kesejahteraan rakyat. Pada titik ini kaum populis juga senantiasa menggemakan narasi-narasi yang menyudutkan pemerintah dan tampil sebagai tokoh *protagonis* yang senantiasa memihak rakyat serta menampilkan janji-janji yang menyejukkan. Narasi-narasi ini sesungguhnya bukan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat melainkan semata-mata agar mereka mendapat tempat di hati rakyat (memperoleh simpati) dan pada gilirannya memperoleh dukungan dalam percaturan politik.

Pembahasan mengenai pendekatan yang digunakan kaum populis dalam melancarkan aksinya menunjukkan beberapa hal penting sehubungan dengan pola gerakan populis. Baik pendekatan diskursif Laclau maupun pendekatan ideasional Mudde menyajikan kepada kita bahwa kaum populis senantiasa menempatkan diri sebagai yang berada dipihak rakyat dan menentang pemerintah atau penguasa. Keberpihakan ini ditandai dengan kebiasaan menggelari penguasa sebagai tokoh penindas dan tamak yang mengabaikan kepentingan umum (*general will*) dan aspirasi rakyat. Meski condong ke rakyat, padahal motivasi asali mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan politis bagi diri dan kelompoknya sendiri. Hal ini jugalah yang tersembuyi di balik aneka janji yang mereka berikan kepada rakyat perihal penyelenggaraan negara yang adil, transparan dan mendahulukan kesejahteraan bersama apabila berkuasa. Pola pergerakan dan cara kerja yang demikian memperlihatkan kepada kita bahwa kaum populis tengah memainkan apa yang disebut *Goffman* sebagai panggung depan dan panggung belakang. Di hadapan rakyat mereka tampil seolah-olah sebagai 'ratu adil' yang dapat membawa perubahan bagi kehidupan bersama, sementara dibaliknyanya memiliki tujuan yang buruk, yakni memperoleh simpati untuk mendapatkan kekuasaan semata.

3) Isu-isu yang Dimainkan Kaum Populis

Gerakan populis tidak akan pernah berhasil tanpa kehadiran isu-isu sentral yang memungkinkan adanya 'keterpisahan' antara rakyat dengan pemerintah atau paling kurang mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Ada beragam isu yang dimainkan dalam gerakan populis. *Pertama*, persoalan sosio-ekonomi. Isu seputar masalah ekonomi dengan mudah disimak dalam populisme yang berkembang di Amerika Latin. Salah satu tokoh yang 'mahir' memanfaatkan isu ini adalah Hugo Chavez (presiden Venezuela dalam kurun waktu 14 tahun 1999-2013). Chavez menuduh penguasa saat itu sebagai penyebab dari kekacauan ekonomi rakyat, tokoh yang cenderung korup, dan otoriter. Tuduhan-tuduhan ini dengan mudah mempengaruhi masyarakat yang pada saat itu berada dalam keterpurukan ekonomi, sehingga mereka bersimpati kepada Chavez. Alhasil ia terpilih menjadi presiden dalam kanca perpolitikan Venezuela.

Kedua, nativisme. Peranan isu nativisme ini dengan mudah ditelusuri dalam perkembangan populisme beberapa negara besar seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris (Hilmy, 2020). Di Indonesia isu nativisme seringkali menjelma dalam upaya menghadap-hadapkan rakyat pribumi dengan para pendatang, semisal mengenai bangsa Tionghoa yang menetap di Indonesia. Kaum populis membangun narasi yang menempatkan rakyat pribumi sebagai yang tidak diakomodasi kepentingannya oleh pemerintah, sedangkan mereka yang berketurunan China (Tionghoa) selalu diperhatikan (Hilmy, 2020). Efek lanjutan penggunaan isu pribumi-pendatang ini ialah terciptanya narasi 'kita' – 'mereka', yang mana 'kita'-pribumi mesti membendung dan meminggirkan 'mereka-keturunan China' dari kehidupan bersama, termasuk dalam konstentasi politik. Momen ini pada gilirannya dimanfaatkan oleh kaum populis pribumi, untuk menarik simpati dan dukungan rakyat dalam usaha memperoleh kekuasaan. Fenomena nativisme ini ditemukan pula di Amerika, khususnya pada era Trump. Dalam pernyataan-pernyataannya, Trump seringkali berlaku rasis terhadap orang-orang yang dianggap bukan orang asli Amerika. Dalam salah satu kampanyenya pada tahun 2015, ia malahan terang-terangan menyebut orang-orang Meksiko yang datang ke Amerika sebagai penjahat dan pemerkosa (Hilmy, 2020). Pernyataan-pernyataan seperti ini tentu bertujuan untuk menarik perhatian sekaligus dukungan rakyat yang menyatakan diri sebagai orang Amerika asli. Hemat saya narasi dibangun Trump membuahkan hasil sebab, kendati tidak terlalu diunggulkan, ia terpilih menjadi Presiden Amerika pada tahun 2016. Di tempat-tempat lain di Eropa salah satu isu yang mendapat sorotan kaum populis mengenai nativisme ialah kehadiran imigran beragama muslim. Tidak jarang kaum populis mempertentangkan rakyat asli dengan imigran yang dituduh sebagai pembawa masalah dan pelaku teror. Semua ini dilakukan hanya untuk mendapatkan simpati rakyat. Agar mereka dinilai sebagai pihak yang memperhatikan keamanan bangsa dan negara. Halnya berujung pada mengalirnya dukungan kepada para populis.

Kedua isu yang diuraikan di atas tidak pernah terpisahkan dari ciri dasar kaum populis yang senantiasa menentang *elite* yang berkuasa. Dengan kata lain, dua isu di atas selalu berada dalam kerangka melawan pemerintah yang berkuasa. Bentuk perlawanan ini mewujud dalam ketidaksetujuan mereka terhadap sikap pemerintah yang menerima kehadiran imigran dan memberi perhatian kepada para pendatang. Di sini mereka hendak menentang struktur dan kebijakan pemerintah. Sasaran dari perlawanan ini ialah untuk memperoleh dukungan massa, khususnya yang sepemikiran dengan mereka.

4) Penyebab dan Tanggapan atas Kemunculan Populisme

Ada begitu banyak pendapat mengenai faktor penyebab kemunculan populisme. Salah satu pandangan yang berlaku umum menyatakan bahwa populisme muncul karena kehadiran tokoh populis karismatis. Pada titik ini penampilan seorang pemimpin ditengarai mampu menarik perhatian rakyat yang kecewa atau merasa diabaikan oleh pemerintah. Ketertarikan ini membuat mereka terdorong untuk memihak pemimpin bersangkutan dan memberinya kekuasaan politik melalui dukungan dalam pemilihan umum. Meski kelihatan sah, pendapat ini masih belum memadai. Mengenai hal ini Mudde mengatakan bahwa problemnya ialah tidak semua gerakan populisme dipimpin oleh pemimpin yang karismatik. Dan, cara berpolitik *a la* populisme tetap eksis kendati tanpa kehadiran tokoh populis karismatis.

Dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab kelahiran populisme, penulis lebih meyimak beberapa poin yang diuraikan Mudde dalam bukunya *Populism: A Very Short Introduction*. Hemat

saya, uraian dan analisis beliau lebih komprehensif, kompatibel, dan merepresentasikan semua hal yang menjadi musabab berkembangnya populisme. Menurut Mudde perkembangan populisme terjadi karena adanya permintaan dan penawaran akan model berpoltik demikian. Saya menyebut ini sebagai hukum permintaan dan penawaran populisme. Hukum permintaan-penawaran Mudde mirip dengan hukum yang sama dalam bidang ekonomi. Hal yang perlu digarisbawahi, permintaan akan populisme muncul karena adanya situasi tertentu dalam kehidupan masyarakat, demikian juga penawaran. Lebih jauh, permintaan selalu mengandaikan adanya penawaran. Permintaan tanpa penawaran tidak akan membawa hasil, sebaliknya penawaran tanpa permintaan adalah mubazir. Hukum permintaan dan penawaran mengakomodasi populisme dari dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu massa atau rakyat dengan *elite* populis. Permintaan datangnya dari massa, sementara penawaran berasal dari elit populis.

Secara sederhana sisi permintaan tampak dalam kebutuhan rakyat akan hadirnya sosok pembawa perubahan dalam kehidupan bersama, sosok yang mampu mewujudkan *bonum commune*. Dalam hal ini kerinduan terhadap perubahan berkontribusi pada munculnya sikap dan ide populis. Permintaan menjadi ruang yang memberi peluang bagi kaum populis untuk menawarkan dirinya kepada rakyat. Penawaran ini mewujud dalam klaim diri bahwa mereka adalah sosok-sosok pembawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa agar penawaran diterima masyarakat dan kaum populis mendapat dukungannya, yang ditawarkan mestilah sesuatu yang dapat dipercaya atau kredibel.

Permintaan akan populisme dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. *Pertama*, pemerintah yang berkuasa atau 'kaum elit' bertindak korup. Tingginya korupsi di kalangan elit membuat rakyat marah dan kehilangan rasa percaya kepada pemerintah. Situasi ini diperparah oleh isu yang disebarluaskan oleh kaum populis bahwa pemerintah yang berkuasa tidak jujur dan mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli pada aspirasi rakyat. *Kedua*, pemerintahan yang tidak responsif. Penguasa dan pemerintah yang tidak memperhatikan kesejahteraan dan aspirasi rakyat, menjadi lahan subur bagi populisme. Rakyat yang membutuhkan kehadiran pemimpin responsif memungkinkan adanya permintaan akan kaum populis. *Ketiga*, minimnya kontrol dan pengendalian media oleh elit politik atau pemerintah. Kenyataan ini dapat melahirkan pemberitaan media yang tak terkontrol dan bahkan tidak benar (*hoax*) dalam bidang-bidang yang sensitif seperti korupsi dan tindak kejahatan oleh penguasa. Menjamurnya isu-isu ini dapat membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Fakta tersebut membuat permintaan rakyat akan adanya suatu pemerintahan baru yang dapat dipercaya semakin tinggi. Perlu diingatkan bahwa pengontrolan bukan berarti pembredelan pers seperti yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru. Pengendalian ini hanya menyentuh media-media yang memberi informasi keliru atau *hoax*. Halnya penting sebab isu-isu di media bisa saja merupakan agenda politik kelompok tertentu yang berupaya menjatuhkan citra pemerintah. *Keempat*, terbatasnya mobilisasi kognitif di kalangan rakyat. Mobilisasi yang terbatas ini melahirkan suatu rakyat yang memiliki nalar kritis yang minim. Konsekuensinya mereka kurang paham politik dan dengannya secara mudah diberdayakan serta dimobilisasi oleh informasi-informasi *serong* di media, termasuk media sosial.

Berbeda dengan sisi permintaan, penawaran datangnya dari kaum populis. Halnya mewujud dalam klaim-klaim diri sebagai pembawa perubahan. Penawaran mesti seimbang dengan permintaan. Apabila keduanya tidak sebanding, dalam artian ada penawaran tetapi nihil permintaan, kaum populis akan gagal serta populisme dari sendirinya mati. Hal inilah yang kemudian mendorong para populis untuk selalu aktif membaca situasi sosio-ekonomi-politik suatu negara. Pembacaan ini dapat menentukan berhasil atau tidaknya gerakan populisme yang dicanangkan. Tujuan pembacaan ini ialah untuk mengetahui situasi riil dan aneka aspirasi masyarakat. Apabila situasi masyarakat mengisyaratkan adanya permintaan kehadiran pemimpin populis, penganut populisme kemudian segera melakukan mobilisasi anti elit, mempromosikan solusi cemerlang atas persoalan rakyat, dan mendeklarasikan diri sebagai pembawa perubahan.

Kaum populis juga kerap membangun narasi "kami orang baik" dan "mereka (elit/pemerintah) adalah koruptor atau penindas". Semua upaya ini dilakukan hanya untuk memperoleh perhatian dan dukungan massa. Penjelasan ini menunjukkan bahwa konteks memiliki peranan mendasar dalam kemunculan populisme. Hal ini sangat mempengaruhi ada tidaknya penawaran dari kaum populis. Peran fundamental ini memberi kita pemahaman bahwa realitas konkret suatu negara dapat menghambat dan memfasilitasi perkembangan populisme.

Negara yang memiliki kesamarataan kesejahteraan rakyat, tidak memberi peluang pada populisme. Sedangkan situasi negara yang kacau, memudahkan penerimaan rakyat atas tawaran kaum populis. Kemudahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan rakyat (sisi permintaan) akan hadirnya tokoh pemimpin yang mampu memperbaiki situasi yang ada.

Uraian-uraian di atas memperlihatkan kepada kita bahwa pertumbuhan populisme mengandaikan adanya permintaan dan penawaran akannya. Pemahaman ini juga memuat gagasan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menghambat serta menghentikan laju populisme. Caranya sangat mudah, yakni sebisa mungkin menjauhkan pelbagai hal yang dapat memunculkan permintaan dan penawaran populisme. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menganggapi sisi permintaan akan populismes. *Pertama*, melawan dan mencegah korupsi dengan cara membentuk lembaga otonom yang mampu meminta pertanggungjawaban penguasa. Penuntutan dan sanksi yang memadai bagi koruptor dapat meminimalisasi tindakan korupsi. Hal ini pada gilirannya mengembalikan kepercayaan masyarakat atas pemerintah sehingga mereka 'tidak membutuhkan' pemimpin baru. *Kedua*, pemerintah yang berkuasa mesti responsif terhadap aspirasi rakyat, sejauh bermaksud mewujudkan *bonum commune*. *Ketiga*, memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk memasyarakatkan nilai-nilai demokrasi, membangun masyarakat melek politik, dan memperingatkan bahaya kaum ekstrimis. Kesemuanya ini mampu mengembangkan kemampuan rakyat untuk bersikap kritis atas narasi-narasi yang ada dalam lingkungannya. Pendidikan kewarganegaraan juga mampu memperkuat keyakinan demokratis dan semangat keberagaman. Kemampuan menerima keberagaman menghindari permintaan akan populisme yang berangkat dari isu-isu nativisme. Halnya juga penting untuk menangkal sikap kaum populis yang menolak pluralitas.

Adapun tanggapan atas sisi penawaran harus diupayakan oleh pihak pemerintah atau partai politik yang berkuasa. Empat cara efektif yang diusulkan Mudde dalam menanggapi sisi penawaran populisme adalah sebagai berikut. *Pertama*, pemerintah yang berkuasa melakukan perlawanan terhadap kaum populis secara terbuka dengan cara mengucilkan mereka dan secara radikal melancarkan upaya kudeta terhadap kaum populis yang berkuasa. *Kedua*, membentuk lembaga khusus yang bertujuan untuk melindungi hak-hak fundamental rakyat. Hal ini penting sebab kaum populis kerap kali mencerca ketelodoran pemerintah tentang perlindungan hak-hak masyarakat. *Ketiga*, bekerja sama dengan media agar menghindari isu-isu palsu yang dapat menciptakan ruang bagi kaum populis untuk melakukan pencitraan guna mendulang simpati massa atau rakyat. *Keempat*, bekerja sama dengan institusi supranasional untuk mempromosikan demokrasi dan berusaha melindunginya. Institusi supranasional mengacu pada organisasi lintas negara, semisal PPB. Praktik demokrasi yang benar, mencegah segala kemungkinan bagi kaum populis untuk mendapatkan lahan dalam menerapkan cara berpolitiknya.

b. Politik Identitas sebagai Wajah Populisme di Indonesia

1) Potret Politik Identitas di Indonesia

Politik identitas adalah politik primordial yang dalam pelaksanaannya sebagian politikus dan *elite* memaknainya dalam ranah keturunan, wilayah geografis kedaerahan suku serta dalam kategori ideologi dan agama (Riyanto, 2011). Singkat kata politik identitas adalah suatu cara berpolitik yang menggunakan identitas (suku, keturunan, daerah, agama, ideologi dan lain sebagainya) sebagai sarana untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam berpolitik. Tak jarang bahwa dalam politik identitas mereka yang mayoritas menekan yang minoritas sehingga betapapun cakupannya seseorang tidak akan pernah menang dalam konstetasi politik kalau berposisi sebagai minoritas. Politik identitas seringkali mempertajam perbedaan dan mempolitisasinya sedemikian rupa agar memperoleh simpati dari rakyat yang seidentitas dan supaya lawan politik tidak dapat berbuat apa pun kecuali menyerah atau berkoalisi.

Di Indonesia praktik politik identitas telah dilakukan sejak lama. Halnya dapat disimak dalam pembentukan organisasi-organisasi berbasis kedaerahan di masa perjuangan melawan penjajahan Belanda seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, dan seterusnya (Wijanarko, 2021). Pada era reformasi, politik identitas semakin berkembang, khususnya yang berwajah agama. Salah satu faktor penyebabnya ialah penjaminan kebebasan, termasuk berorganisasi dan berpolitik yang menjadi ciri khas reformasi. Cikal bakal politik identitas berwajah agama juga bisa diasalkan pada kemunculan kelompok-kelompok radikal islam yang menghendaki negara

berbentuk khilafah berdasarkan syariat Islam (Sudrajat, 2009), seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia dan lain sebagainya (Nu'ad, 2002).

Salah satu bukti politik identitas keagamaan di Indonesia adalah fenomena yang terjadi pada pilkada Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Penggunaan isu agama dalam pemilihan gubernur di ibu kota pada waktu itu boleh dikatakan sebagai titik kulminasi dari politik identitas berbasis agama di tanah air. Di samping itu, fakta ini juga menjadi pengingat bawasannya kinerja tata kelola pemerintahan yang baik tidak menjamin hasil pemilihan umum (Wisnu, 2019). Artinya profesionalitas tidak lagi menjadi ukuran yang menentukan kapasitas calon yang diidam-idamkan rakyat. Dalam konteks Indonesia hal semacam ini sangat mungkin terjadi manakala pihak lawan lihai menggunakan sentimen dan narasi pembelaan terhadap agama untuk menuai simpati dan dukungan rakyat. Kenyataan ini diperkuat oleh kebenaran umum mengenai 'kecintaan' manusia Indonesia terhadap agama yang sangat mendalam dan bahkan seringkali melahirkan aksi-aksi yang melukai nilai kemanusiaan.

Dalam kasus ini, Ahok yang dianggap sebagai pelaku penista agama terus disudutkan. Narasi-narasi para lawannya berhasil memobilisasi massa sehingga melahirkan gerakan 411 dan 212 di Jakarta. Di suatu sisi mobilisasi ini mungkin menunjukkan persatuan dan sikap solider umat muslim Indonesia yang merasa dilukai oleh perkataan Ahok dalam salah satu kampanyenya. Namun di lain sisi, pengumpulan massa tersebut jelas-jelas bernuansa politis. Dalam hal ini agama Kristen yang dianut Ahok dipertentangkan dengan agama Islam. Benturan ini tentu membangkitkan sikap saling 'membenci' antarkedua pemeluk agama kendati tidak mencakup semua orang. Dalam pertentangan ini yang diuntungkan adalah pihak lawan yang memainkan narasi agama, sebab mayoritas pemilih adalah kaum muslim. Bukti nyata politisasi agama yang merupakan perwujudan politik identitas semakin nyata dalam menjelmannya kasus Ahok menjadi ladang politik praktis tempat para lawannya meyampaikan ajakan yang mereka pahami tentang haramnya kepemimpinan non-muslim dalam Islam (Kurniawan, 2018).

Penjelasan singkat di atas menunjukkan suburnya praktik politik identitas di Indonesia. Dalam hal ini, agama merupakan ranah identitas yang paling sering digunakan sebagai ladang politik. Agama dipolitisasi sedemikian rupa agar memperoleh dukungan dan simpati rakyat. Politisi beragama mayoritas merupakan pihak yang sangat diuntungkan politik identitas keagamaan. Hal inilah yang terjadi di Indonesia. Politisi muslim yang memainkan narasi agama seringkali mendapat tempat dan dukungan dari rakyat yang mayoritas beragama Islam. Sebagaimana lazimnya, dalam politik identitas berwajah agama politisi lain disudutkan dan minoritas dibenturkan dengan mayoritas. Kasus Ahok dalam pemilihan gubernur DKI pada tahun 2017 dan wacana-wacana berbau politik yang berkembang saat itu adalah buktinya. Dalam politik identitas berwajah agama di Indonesia, aktor politik yang memainkan isu agama seolah-olah tampil sebagai pembela dan penganut agama mayoritas yang setia. Padahal tujuan mereka sebenarnya hanya untuk mendapatkan simpati dan dukungan rakyat dalam kontestasi politik.

2) Politik Identitas: Wajah Populisme Indonesia

Politik identitas berwajah agama yang diterapkan di Indonesia sangat mirip dengan gerakan kaum populis. Kesamaan keduanya terletak dalam cara kerja yang dilakukan. Dalam populisme, kaum populis membelah masyarakat mejadi dua yaitu rakyat dan elit/penguasa serta mempertentangkan keduanya. Hal serupa juga ditemukan dalam politik identitas keagamaan di Indonesia, khususnya dalam dua cara kerja yang mereka terapkan berikut ini.

Pertama, para politisi yang menggemari politik identitas keagamaan membelah masyarakat menjadi dua bagian, yaitu mayoritas dan minoritas, dan kemudian berusaha mempertentangkan keduanya. Hemat saya cara kerja seperti ini khas milik Indonesia atau sekurang-kurangnya milik negara-negara yang 'memainkan' agama dalam perpolitikannya. Penggunaan cara kerja ini dapat kita simak dalam kasus Ahok yang telah disinggung sebelumnya. Ahok ditempatkan sebagai minoritas yang memiliki segala perbedaan dengan mayoritas. Ruang perbedaan ini makin meluas dengan terbangunnya narasi halal-haram. Para lawan Ahok menggemakan bawasannya tidak halal bila kaum muslim dipimpin oleh non-muslim atau 'kaum kafir'. Semua narasi yang dilakukan ini pada gilirannya menguntungkan politisi muslim di satu pihak, dan di pihak lain menyudutkan politisi minoritas kendati profesionalitasnya telah teruji. Dalam artian simpati dan dukungan rakyat yang sebagian besar beragama muslim mengalir hanya ke politisi bersangkutan seagama dengan mereka. Akibatnya politisi minoritas terlengserkan dari kontestasi politik.

Kedua, para tokoh politik tertentu juga mengikuti cara kerja kaum populis. Mereka membelah masyarakat menjadi dua, yakni rakyat dan elit atau penguasa. Namun di sini rakyat yang mereka maksudkan adalah bukan mencakup semua, melainkan hanya kelompoknya. Mereka menghomogenkan masyarakat yang heterogen. Selanjutnya dengan mengikrarkan diri sebagai yang membela rakyat, tokoh-tokoh ini berusaha mempertentangkan rakyat dengan penguasa. Mereka menuduh pemerintah bersifat otoriter dan memihak minoritas. Padahal sasaran akhir mereka ialah hanya untuk mendapatkan dukungan politik atau paling tidak agar politisi atau partai yang dekat dengan mereka mendapat tempat di hati rakyat dan pada gilirannya memenangkan pemilihan umum. Dalam konteks Indonesia hal ini dapat disimak dalam tindakan tokoh-tokoh agama yang memiliki maksud politis seperti halnya Rizieq Shihab. Pernyataan-pernyataan Rizieq kerap kali menyudutkan pemerintah dan menuduh mereka melakukan kriminalisasi agama dan lebih mementingkan kelompok minoritas. Setelah menggaungkan isu-isu ini, ia kemudian mengklaim diri sebagai sosok pembawa perubahan, semisal dengan mencanangkan revolusi akhlak. Tuduhan yang dilakukan terhadap pemerintah beserta janji-janji yang diberikan ini hanya bertujuan untuk memobilisasi massa sehingga mendukung Rizieq dan atau pihak yang 'menggunakan' jasanya dalam kanca perpolitikan Tanah Air.

Berdasarkan analisis di atas kita menemukan bahwa populisme dan politik identitas keagamaan memiliki kemiripan satu sama lain. Kemiripan keduanya mengafirmasi keberadaan politik identitas berwajah agama sebagai wujud populisme di Indonesia. Dari cara kerjanya kita dapat melihat model pendekatan yang dilakukan kaum populis di Indonesia mencakup pendekatan diskursif Laclau dan ideasional *a la* Mudde. Pendekatan diskursif ditunjukkan oleh politisi yang melakukan penyeragaman aspirasi umat muslim menyangkut paham halal-haram dalam sistem pemerintahan, utamanya mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi pemimpin. Dalam pendekatan ini mereka menggeneralisasi penolakan seluruh umat Islam akan hadirnya pemimpin non-Islam. Narasi yang dimainkan di sini ialah penolakan atas pemimpin non-muslim. Alasan yang mereka kemukakan ialah umat muslim tidak boleh dipimpin oleh yang non-muslim atau kaum kafir. Sedangkan pendekatan ideasional ditunjukkan oleh politisi yang membuat pemisahan antara rakyat beragama muslim dengan pemerintah atau elit. Dalam situasi ini mereka kerap memihak rakyat muslim dan menuduh pemerintah sebagai penindas, berlaku otoriter, mementingkan minoritas dan tidak mengakomodasi kepentingan rakyat beragama muslim (Levitsky & Zibla, 2019).

Selain memiliki kesamaan dalam pendekatan yang digunakan, populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia pada dasarnya mempunyai faktor-faktor penyebab kemunculannya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menemukan bahwa populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia lahir karena adanya permintaan dari masyarakat dan penawaran dari elit populis. Dalam hal ini permintaan dan penawaran berkesinambungan sehingga memungkinkan populisme bertumbuh subur dalam wujud politik identitas yang merambah wilayah agama.

Dari perspektif hukum permintaan dan penawaran ada beberapa situasi yang membuat rakyat beragama muslim di Indonesia mengharapkan hadirnya tokoh pembawa perubahan kendati mereka itu elit populis yang mencari simpati dan dukungan politis semata. Kedua hal tersebut ialah: *Pertama*, menjamurnya kasus korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan fenomena yang kerap terjadi di Indonesia. *Litbang Kompas* misalnya menyajikan bahwa setahun terakhir (hingga Maret 2021) telah terjadi pelbagai bentuk korupsi di Pulau Jawa, yakni pungutan liar saat mengurus bantuan sosial atau subsidi pemerintah (31, 9%), pungutan liar saat mengurus dokumen administrasi di lembaga pemerintahan (19, 0%), dan suap pada aparat pemerintahan atau penegak hukum (9, 3%) (Afrianto, 2021). Merebaknya kasus korupsi tentu membuat rakyat kecewa dengan pemerintah. Konsekuensinya, kerinduan akan hadirnya 'ratu adil' kembali muncul ke permukaan. Di sini permintaan akan hadirnya pemimpin populis menguat. *Moment* ini kemudian akan menguatkan penawaran kaum populis. Dalam hal ini mereka mengklaim diri sebagai ratu adil yang akan membawa perubahan dan menawarkan solusi yang cocok untuk mengatasi masalah seputar korupsi yang ditimbulkan para elit. Melengkapi klaim-klaim ini, mereka juga akan melabeli pemerintah sebagai sosok penindas yang mengabaikan kepentingan umum (*general will*). Dalam konteks Indonesia, kaum populis juga akan menyebut dirinya sebagai agamawan berhati mulia dan taat atau bahkan utusan Tuhan sehingga tidak mungkin bertentangan dengan kehendak rakyat. Semua usaha ini akan membuahkan hasil yang baik sebab masyarakat tengah berada dalam 'kemarahan' atas pemerintah.

Kedua, adanya kerinduan rakyat untuk membentuk negara *khilafah* berdasarkan hukum Islam. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mendominasi dan masih minim. Namun saya melihat bahwa perkembangan organisasi Islam radikal, kendati beberapa sudah dibubarkan, dapat memperkuat kehendak untuk membentuk negara khilafah di Indonesia. Halnya juga dapat dipengaruhi oleh kemenangan kelompok Taliban di Afghanistan. Bukti mengenai adanya kerinduan untuk mendirikan negara khilafah ini dapat disimak dalam salah satu survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Minggu (4/6/2017) (www.nasional.kompas.com, 2021). Survei ini menemukan bahwa 9,2 persen responden setuju jika NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam, sedangkan 79,3 persen lainnya tetap mempertahankan Indonesia yang berasaskan Pancasila. Kendati tergolong sedikit jumlah ini tetap menunjukkan adanya kemauan rakyat muslim untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

Situasi ini kemudian digunakan oleh kaum populis yang menjelma dalam politisi berjabah agama untuk mempromosikan diri. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan janji bahwa ketika berkuasa atau setidaknya ketika politisi yang didukungnya menjabat kerinduan masyarakat muslim ini dapat diwujudkan. Halnya mungkin dapat kita simak dalam narasi 'revolusi akhlak' berbasis agama yang dimainkan Rizieq Shihab (www.wartaekonomi.co.id, 2021). Adanya permintaan dari rakyat yang direspons secara baik oleh politisi atau pun agamawan bertujuan politis memungkinkan bertumbuhnya populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia. Di sini kaum populis dipandang sebagai mereka yang berpihak pada rakyat yang dianggap sebagai yang benar: *vox populi, vox Dei*.

Ketiga, besarnya pengaruh agama di banding negara. Di Indonesia pengaruh agama sangat nampak dan bahkan turut mempengaruhi kebijakan negara. Pada sisi tertentu hal ini baik adanya karena agama mengajarkan keutamaan-keutamaan yang menjamin kedamaian dalam hidup berbangsa. Namun di lain sisi, pengaruh agama yang 'mengatasi' negara ini dapat menjadi ladang bagi kaum populis yang menggandrungi politik identitas berbasis agama. Radikalisme agama yang tergolong tinggi membuat rakyat mudah dimobilisasi untuk memihak politisi yang seagama dengannya. Hal ini tampak jelas dalam kasus pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2017.

Penjelasan mengenai faktor penyebab kemunculan populisme di atas menampilkan suatu pemenuhan akan hukum permintaan dan penawaran populisme *a la* Mudde. Halnya memberi kita gambaran bahwasanya populisme berwajah politik identitas di Indonesia berkembang karena adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan populisme. Penemuan ini memperjelas dua kesimpulan sebelumnya, yakni mengenai kesamaan pendekatan politik identitas berbasis agama di Indonesia dengan populisme. Hal-hal ini pada akhirnya mengafirmasi asumsi penulis bahwa politik identitas bernuansa agama adalah wajah populisme Indonesia.

c. Solusi

Berkembangnya populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia perlu disikapi agar tidak menimbulkan bahaya *laten* seperti lahirnya pemimpin otoriter sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang lebih dahulu mengecap populisme. Belajar dari solusi yang ditawarkan Mudde, penulis menawarkan beberapa langkah efektif yang dapat menghentikan skema permintaan-penawaran populisme di Indonesia. Adapun langkah-langkah tersebut ialah sebagai berikut.

1) Penyelenggaraan Negara yang Transparan dan Responsif

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, korupsi merupakan salah satu faktor yang memunculkan adanya permintaan dan penawaran akan kehadiran kaum populis. Oleh karena itu, demi menghambat laju dan perkembangan populisme serta mencegah menguatnya tawaran kaum populis, pemerintah mesti mengusahakan suatu penyelenggaraan negara secara transparan dan menghukum para koruptor dengan tegas. Cara lain ialah membentuk lembaga-lembaga yang secara khusus mengontrol kinerja para penguasa, semisal KPK. Hemat saya penyelenggaraan negara yang transparan membuat masyarakat tidak merasa dibodohi sekaligus membangkitkan kepercayaan mereka kepada pemerintah. Situasi ini akan memperlemah permintaan akan hadirnya tokoh populis sekaligus membuat tawaran mereka tidak berguna. Para populis tidak akan mendapat simpati rakyat sehingga kemungkinan bagi mereka untuk berkuasa adalah nihil.

Selain transparan kepada rakyat, pemerintah juga mesti responsif terhadap aspirasi rakyat dan mendahulukan kepentingan semua orang demi *bonum commune*. Sikap pemerintah yang responsif dapat membuat masyarakat merasa terakomodir sehingga tidak memerlukan figur lain yang menjanjikan aneka hal seperti kaum populis. Responsivitas juga dapat meminimalisir permintaan akan hadirnya tokoh populis yang dianggap sebagai ratu adil.

2) Memaksimalkan Pendidikan Kewarganegaraan

Langkah lain yang perlu ditingkatkan adalah memaksimalkan pendidikan kewarganegaraan. Tujuannya ialah agar masyarakat memiliki pemahaman memadai tentang negara, dalam konteks Indonesia berhubungan dengan pengetahuan tentang demokrasi (Pancasila), dan melek dalam politik. Cara ini dapat menangkal perkembangan dan tawaran populisme dalam wujud politik identitas keagamaan sebab rakyat tidak mudah dipengaruhi. Rakyat yang memiliki pengetahuan memadai dan nalar kritis dapat membedakan yang benar dan yang salah. Halnya dapat mengatasi isu-isu tidak benar yang sengaja dipolitisasi kaum populis. Lebih jauh pendidikan kewarganegaraan juga dapat memampukan masyarakat untuk memisahkan agama sebagai privat dengan negara. Pembedaan ini dapat mengatasi kerinduan akan berdirinya negara berasas Islam yang seringkali menjadi lahan subur bagi kaum populis Indonesia atau penganut politik identitas keagamaan.

3) Peranan Media

Tak dapat disangkal bahwa media juga memiliki andil dalam menghambat dan memfasilitasi perkembangan populisme. Oleh karena itu, segenap media mesti bekerja sama untuk tidak menyediakan ruang pencitraan diri bagi kaum populis. Secara sederhana media diajak untuk tidak menyebarkan berita bohong dan isu sensitif yang keabsahannya tidak teruji.

4. Simpulan

Politik identitas berwajah agama merupakan suatu bentuk populisme yang tengah berkembang di Indonesia. Halnya lolos kategori populisme karena memiliki cara kerja dan model pendekatan yang sama. Cara kerja yang dilakukan adalah memisahkan rakyat menjadi dua (mayoritas-minoritas) dan menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Kaum kemudian mendeklarasikan diri sebagai pihak yang menjadi bagian dari mayoritas dan memosisikan diri sebagai pembela rakyat. Tujuan yang hendak dicapai kaum populis Indonesia ialah memobilisasi massa dan mendapatkan dukungan politis.

Kriteria lain yang mengafirmasi keberadaan politik identitas keagamaan di Indonesia sebagai wajah populisme terletak pada pemenuhan atas hukum permintaan-penawaran populisme *a la* Mudde. Faktor penyebab kemunculan populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia ialah menjamurnya kasus korupsi, adanya kerinduan rakyat untuk membentuk negara *khilafah*, dan pengaruh agama yang melebihi negara sehingga agama 'seakan-akan mesti didahului ketimbang negara secara keseluruhan'.

Dalam rangka menanggapi berkembangnya populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia ada beberapa hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, mengusahakan penyelenggaraan negara yang transparan dan responsif. *Kedua*, memaksimalkan pendidikan kewarganegaraan. *Ketiga*, mengoptimalkan peranan media massa yang menggemakan kebenaran kepada publik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A Nu'ad, Ismatillah. *Fundamentalisme Progresif: Era Baru Dunia Islam*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Afrianto Dedy, "Benang Kusut Praktik Korupsi." *Kompas*, Senin, 29 Maret 2021.
- Hilmy, Muhammad Irfan. "Fenomena Gerakan Populisme Dalam Kemunduran Demokrasi." *Jurnal Civic Hukum* 5, no. 2 (November, 2020): 145-156. DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13080>
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/18440061/survei.smrc.hanya.9.2.persen.wni.set.ju.indonesia.jadi.negara.khilafah>, diakses pada Minggu 30 Mei 2021, di Malang.
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read316837/pentolan-fpi-rizieq-gaungkan-revolusi-akhlakbuat-gulingkan-jokowi>, diakses pada Minggu 30 Mei 2021, di Malang.

- Ilaa, Dhiyaa Thurfah. "Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi." *Jurnal Filsafat Indonesia* 4 no. 3 (2021): 212-216.
- Kurniawan, Budi. "Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (Januari-Juni 2018): 133-254. DOI: <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>
- Levitsky, Steven & Daniel Zibla. *Bagaimana Demokrasi Mati*. Penerj. Zia Anshor. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Margiansyah, Defbry. "Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme Dan Konsekuensinya Dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019." *Jurnal Penelitian Politik* (Juni, 2019): 47-68. DOI: <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.783>
- Mouffe, Chantal. *Populisme Kiri*. Penerj. Melfin Zaenuri. Yogyakarta: Penerbit Antinomi, 2020.
- Mudde, Cas. *A Verry Short Introduction*. Inggris: Oxford University Press, 2017.
- Müller, Jan Werner. *What Is Populism?* Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.
- Riyanto, Armada. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Sudrajat, Ajat. "Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Informasi* Vol. 35, No 2, (2009), 2. DOI: <https://doi.org/10.21831/informasi.v2i2.6385>
- Wijanarko, Robertus. "Religious Populism and Public Sphere in Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora* (2021): 1-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v0i0.8547>
- Wisnu, Dinna (ed.). *Populisme, Politik Identitas Dan Erosi Demokrasi Di Abad Ke 21*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019.